

## Penelitian Sosial *vis a vis* Kebijakan Pendidikan

Oleh Bambang Indriyanto<sup>\*)</sup>

**Abstrak:** Kebijakan pendidikan dengan subyek peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan merupakan proses yang bersifat dinamis searah dengan perkembangan jaman dan kemajuan pendidikan. Untuk menetapkan kebijakan yang tepat sasaran diperlukan informasi yang up to date dan obyektif. Penelitian sosial dapat memainkan peran untuk menyediakan informasi yang bersifat up-to-date dan obyektif. Adanya dikotomi antara penelitian murni dan terapan, serta perbedaan circumtnaces antara peneliti sosial yang cenderung berasal dari perguruan tinggi dan birokrat yang menyebabkan terjadinya gap antara kedua belah pihak merupakan dua faktor yang menyebabkan rekomendasi penelitian sosial kurang dimanfaatkan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tulisan ini mengemukakan secara terpisah karakteristik penelitian sosial di satu pihak dan karakteristik kebijakan pendidikan di lain pihak. Berdasarkan pembahasan kedua karakteristik tersebut maksimalisasi sinergi penelitian sosial *vis a vis* kebijakan publik diusulkan sebagai cara untuk memaksimalkan pemanfaatan hasil penelitian sosial bagi perumusan kebijakan pendidikan.

**Kata kunci:** penelitian sosial dan kebijakan pendidikan

### 1. Pendahuluan

Pengambilan kebijakan pendidikan merupakan proses intervensi yang bersifat dinamis dengan subyek peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Subyek kebijakan pendidikan senantiasa menyesuaikan dengan tuntutan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Kebijakan perluasan akses pendidikan, misalnya, senantiasa berkembang searah dengan aspirasi anggota masyarakat. Pada tahun 1984 kebijakan perluasan akses pendidikan diaktualisasikan melalui program Wajar Dikdas 6 tahun. Searah dengan keberhasilan pelaksanaan Wajar Dikdas 6 tahun yang ditandai dengan

angka partisipasi murni jenjang pendidikan dasar 6 tahun mencapai lebih dari 90% dan meningkatnya permintaan sebagian anggota masyarakat terhadap pendidikan yang lebih tinggi, maka pada tahun 1994 kebijakan Wajar Dikdas diperluas sampai dengan 9 tahun. Pada saat ini, bahkan terdapat beberapa daerah di Indonesia seperti Provinsi Jawa Timur, kota Bontang dan Pangkalpinang telah merintis program wajib belajar 12 tahun.

Demikian halnya dengan kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Pada era 70an kebijakan ini masih menekankan pada proses. Mengacu pada Dokumen Repelita, peningkatan mutu belum secara eksplisit menentukan *benchmark* mutu pendidikan. Hal ini terjadi sampai dengan akhir pelaksanaan Replita V. Sejak era reformasi tuntutan terhadap *benchmarking* mutu pendidikan menjadi lebih mengemuka. Hasil studi *TIMMS* yang menunjukkan posisi prestasi peserta didik setara SMP Indonesia berada pada posisi 38 menjadikan para politisi, pengambil kebijakan, dan pendidik merasa teritinggal dibanding dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Pada era kabinet persatuan Departemen Pendidikan Nasional telah secara lebih eksplisit mene-

apkan *benchmark* mutu pendidikan. Di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Menteri Pendidikan Nasional menetapkan *benchmark* sampai dengan akhir tahun 2009, antara lain sebagai berikut (a) nilai rata-rata ujian nasional lulusan SMA/MA/SMK dan SMP/MTs 7, (b) 155 sekolah/madrasah bestatus sebagai sekolah bertaraf internasional, dan (c) 10 Program Studi Pendidikan Tinggi yang masuk 100 besar Asia, 500 besar Dunia, atau berakreditasi taraf OECD/Internasional. Di samping itu, Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, telah merintis uji kompetensi bagi setiap lulusan SMK sehingga mereka siap memasuki pasar kerja baik dalam negeri maupun luar negeri.

Lebih dari semua itu, kebijakan pendidikan dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik karena berbagai pertimbangan. Pertama, kebijakan pendidikan mempunyai dampak terhadap masyarakat secara luas. Kedua, untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan diperlukan dana publik yang sangat besar, bahkan alokasi dana untuk pendidikan merupakan alokasi terbesar jika dibanding dengan alokasi dana untuk sektor publik lainnya. Dana sebesar ini dialokasikan

<sup>\*)</sup> Dr. Bambang Indriyanto adalah staf Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah

untuk menunjang tiga pilar kebijakan yang meliputi: (1) perluasan dan pemerataan akses pendidikan; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; serta (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan.

Efektivitas kebijakan pendidikan yang dinamis memerlukan dukungan informasi yang secara sistematis dan ekstensif. Penelitian sosial dapat menjadi sumber informasi yang sesuai dengan kriteria tersebut. Dalam konteks ini pengertian penelitian sosial *vis a vis* kebijakan pendidikan adalah di satu pihak penelitian sosial menyediakan informasi yang bersifat sistematis dan ekstensif, di lain pihak kebijakan pendidikan, baik pada saat proses penyusunan maupun implementasinya, menyajikan suatu fenomena yang dapat menjadi obyek penelitian sosial.

Berdasarkan pengertian penelitian sosial *vis a vis* kebijakan pendidikan, tulisan ini dimaksudkan untuk mengetengahkan proses interaktif (yang dinamis) antara penelitian sosial dan kebijakan pendidikan. Artikulasi tentang proses interaktif tersebut akan diketengahkan pada bagian akhir dari tulisan ini yaitu mengenai maksimalisasi sinergi penelitian sosial *vis a vis* kebijakan pendidikan.

## 2. Kajian Literatur dan Pembahasan

### 2.1 Mitos Penelitian Sosial *vis a vis* Kebijakan

Dalam berbagai diskusi sering dikemukakan dikotomi antara penelitian sosial murni dan penelitian sosial terapan. Penelitian murni secara eksklusif dianggap sebagai ranah perguruan tinggi, sehingga tidak mempunyai keterkaitan dengan kebijakan publik pada umumnya dan kebijakan pendidikan pada khususnya. Di lain pihak penelitian sosial terapan merupakan penelitian yang menjadi ranah lembaga-lembaga (penelitian) selain perguruan tinggi. Penelitian sosial terapan ini diarahkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh suatu instansi pemerintah.

Dalam berbagai diskusi terkadang dikemukakan suatu pendapat yang cenderung naif tentang dikotomi penelitian sosial murni dan penelitian sosial terapan. Pendapat tersebut misalnya mengatakan bahwa penelitian sosial terapan lebih tepat menggunakan metode kualitatif daripada kuantitatif. Pendapat yang lebih ekstrim menyatakan bahwa penelitian terapan bukan merupakan penelitian akademik (namun tidak sama artinya dengan tidak ilmiah) karena diarahkan untuk memecahkan

masalah, sehingga penelitian sosial terapan tidak memerlukan kerangka teori.

Dikotomi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam kenyataannya perbedaan (*gap*) antara penelitian sosial murni dan penelitian sosial terapan merupakan garis kontinum. Tidak ada temuan penelitian murni yang tidak mempunyai sumbangan terhadap perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan. Sebaliknya tidak ada proses perumusan atau implementasi kebijakan publik atau pendidikan yang tidak memberikan dampak terhadap pelaksanaan penelitian sosial murni lebih tepatnya pengembangan teori (*theoretical refinement*) pada suatu cabang ilmu pengetahuan sosial. Sebagaimana diberitakan oleh Kompas (17 Oktober 2007, Hal, 12) teori disain mekanis di bidang ekonomi yang dikembangkan oleh Prof. Maskin dari Princetone University, Prof. Meyerson dari University of Chicago, dan Prof. (Emiritus) Hurwicz dari University of Minnesota dinilai memberikan sumbangan sangat bermanfaat dalam pemanfaatan sumber daya yang langka untuk meningkatkan kemakmuran. Hal itu membuktikan bahwa suatu teori, meskipun sarat dengan

rumusan matematika, tetap mempunyai sumbangan terhadap kebijakan publik. Sebaliknya ketika teori tersebut diimplementasikan dalam kebijakan publik, akan memberikan umpan balik bagi perbaikan teori tersebut.

Permasalahannya tentu saja tidak terletak pada dikotomi antara penelitian sosial murni dan penelitian terapan, tetapi pada masalah substansi dan modus komunikasi antara peneliti sosial yang pada umumnya para pengajar di perguruan tinggi dengan para pengambil kebijakan yang masing-masing mempunyai *circumstances* yang berbeda. Small (2005) mengidentifikasi tiga *circumstances* antara peneliti sosial dengan pengambil kebijakan yang menyebabkan komunikasi antara kedua belah pihak tidak berlangsung secara efektif. Pertama, perbedaan pola pikir antara peneliti sosial dengan pengambil kebijakan. Perbedaan pola pikir ini menimbulkan sikap *a priori* pada kedua belah pihak. Dari sudut pandang peneliti sosial, pengambil kebijakan terlalu pragmatik dalam memahami fenomena sosial. Di lain pihak, peneliti sosial dianggap terlalu prosedural dalam mengidentifikasi dan menetapkan solusi. Akibat lebih lanjut dari perbedaan pola pikir dari kedua belah pihak adalah sensitivitas

dalam memandang suatu fenomena sosial. Bagi pengambil kebijakan suatu fenomena dapat dianggap sebagai isu kebijakan, tetapi bagi peneliti sosial tidak demikian halnya.

Kedua, penelitian sosial tidak cukup komprehensif dalam memberikan solusi kepada pengambil kebijakan yang pada umumnya bersifat kompleks. Analisis yang tidak dihasilkan dari suatu penelitian sosial tidak cukup menyakinkan menjelaskan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh pengambil kebijakan. Hasil perhitungan statistik tidak dapat memberikan suatu keputusan deterministik suatu masalah. Di samping itu, jangkauan inferensi hasil perhitungan statistik untuk kepentingan generalisasi sangat terikat dengan populasi dimana sampel penelitian diperoleh. Ketiga berkenaan dengan *rational technicality* yang muncul sebagai akibat dari *positivism* yang menjadi dasar dalam mengembangkan kerangka teoritis dan prosedur metodologi suatu penelitian sosial. Sebagai akibat dari *positivism* ini rekomendasi hasil penelitian tidak secara tegas mengarah solusi terhadap isu-isu kebijakan. Dengan kata lain rekomendasi hasil penelitian sosial secara teoritis dan metodologis *sound* tetapi tidak *sound* bagi kebijakan pendidikan.

## 2.2 Karakteristik Penelitian Sosial

Hasil penelitian sosial adalah informasi tentang kecenderungan suatu fenomena, terutama hubungan dua fenomena, atau dalam bahasa metodologi informasi yang dihasilkan oleh suatu penelitian adalah, paling tidak, menjelaskan hubungan antara independen variabel dengan dependen variabel.

Oleh karena informasi yang dihasilkan penelitian sosial adalah tentang hubungan antara dua fenomena, maka akurasi dari informasi tersebut ditentukan oleh empat faktor yakni (1) teori yang digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan hypothesis, (2) konsep yang digunakan untuk menetapkan dan mengukur variabel yang dirumuskan dalam hypothesis penelitian, (3) penentuan sampel, terutama untuk penelitian dengan metode kuantitatif. Pentingnya penentuan sampel berkaitan dengan keterwakilan. Dalam penelitian sosial, terutama yang menggunakan metode kuantitatif, koefisien statistik digunakan untuk melakukan inferensi terhadap populasi.

Dengan melakukan inferensi artinya memperkirakan karakteristik populasi dengan menggunakan kecenderungan pada tingkat sampel.

Jika sampel yang diambil representatif, maka kecenderungan pada tingkat sampel akan menggambarkan kecenderungan pada tingkat populasi, tentu saja dengan probabilitas bahwa ada sekitar 5% kecenderungan yang terjadi pada tingkat sampel tidak mencerminkan kecenderungan pada tingkat populasi. Hal ini biasanya dicerminkan dengan  $\alpha = 5\%$ . (4) penggunaan metode dalam pengumpulan data. Pada penelitian yang menggunakan metode kuantitatif pengumpulan data yang lazim digunakan adalah kuesioner. Hal yang perlu mendapat perhatian ketika menggunakan metode kuesioner dalam pengumpulan data adalah validitas dan reliabilitas kuesioner. Secara definisi adalah mengukur yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas adalah mengukur konsistensi data yang dikumpulkan (Carmine dan Zeller, 1979). Tingkat validitas ditentukan berdasarkan pada rujukan konsep yang digunakan pada suatu penelitian. Misalnya konsep tentang status ekonomi keluarga. Konsep ini dapat diukur dari segi kepemilikan suatu keluarga atau dari sisi penghasilan. Status ekonomi keluarga yang diukur kepemilikan lebih mencerminkan status ekonomi keluarga pada masyarakat pedesaan, sedangkan

status ekonomi keluarga lebih tepat menggunakan indikator penghasilan lebih tepat digunakan untuk masyarakat perkotaan. Di negara barat konsep status ekonomi keluarga cenderung menggunakan pendapatan (Toutkoushan, dan Curtis, 2002) dan akses keluarga informasi dan terhadap berbagai fasilitas sosial (Coleman, 1988).

Dalam kenyataan validitas dan reliabilitas tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan selalu ada perbedaan yang ditolelir, setelah mempertimbangkan koefisien statistik (Wikman, 2006). Hal ini dapat terjadi karena konsep validitas dan reliabilitas merupakan model refleksi fenomena sosial yang dibangun sehingga dapat mencerminkan suatu fenomena obyektif (Poon, 2004).

Ada sementara yang berpendapat bahwa penelitian kualitatif tidak memerlukan kerangka teori maupun konsep. Dalam tulisan ini diajukan argumentasi bahwa pada penelitian sosial yang menggunakan metode kualitatif penggunaan kerangka teori dan konsep tetap diperlukan, walaupun tidak sistematis pada penelitian kuantitatif dan penggunaan kerangka teori relatif lebih bebas (*loose*) dari pada penggunaan kerangka teori pada penelitian sosial

dengan menggunakan metode kuantitatif. Paling tidak terdapat tiga tipologi penggunaan kerangka teori pada penelitian sosial yang menggunakan metode kualitatif. Tipologi pertama, untuk kepentingan pembahasan pada artikel ini, disebut *the least-substantive-use of theory*. Pada tipologi ini substansi teori tidak dibahas dan diketengahkan secara eksplisit. Penelitian yang dilakukan oleh Goldstein et.al. 1996) masuk pada tipologi ini. Dalam penelitiannya tentang penggunaan layanan masyarakat oleh berbagai keluarga dari berbagai latar belakang etnis Goldstein menggunakan teori *ecological perspective* dari Bronfrenbrenner. Pada pembahasan tentang kerangka teori, dia tidak mendeskripsikan substansi teori, tetapi justru lebih menjelaskan tentang pentingnya menggunakan teori dalam penelitian yang dilakukannya. Argumentasi yang dikemukakan tentang pentingnya menggunakan dalam suatu penelitian yakni sebagai parameter dalam pengumpulan dan analisis data.

Tipologi kedua, *the less-substantive use of theory*. Penelitian tentang penggunaan *web-based assessment* dan dampaknya terhadap sikap siswa pada pelajaran Matematika (Nguyen, Hsieh, dan Allen,

2006) termasuk dalam tipologi ini. Penelitian ini tidak secara jelas menentukan teori yang digunakan, tetapi dengan merujuk pada berbagai hasil penelitian, peneliti mengidentifikasi bagaimana penggunaan *web-based assessment* dapat merubah sikap siswa terhadap mata pelajaran Matematika. Berdasarkan pada berbagai hasil penelitian tersebut diidentifikasi bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu: (a) penggunaan *web-based assessment* memberi kesempatan kepada siswa untuk menggunakan caranya sendiri ketika melakukan pemecahan masalah, sehingga dapat mengurangi perasaan cemasnya, (b) dengan penggunaan *web-based-assessment* siswa mempunyai kontrol terhadap pengerjaan soal Matematika dan *reinforcement* yang diberikan dapat menumbuhkan *interinsic motivation* dan kepercayaan diri dalam mengerjakan soal-soal Matematika. Jika teori dapat didefinisikan sebagai proposisi umum tentang hubungan dua fenomena, maka dua faktor yang diidentifikasi mempunyai pengaruh terhadap sikap siswa terhadap pelajaran Matematika, dari hasil revidu berbagai hasil penelitian tersebut, pada derajat tertentu, dapat dikategorikan sebagai teori.

Tipologi ketiga, *substantive use of theory*. Penelitian tentang penggunaan komputer laptop oleh siswa kelas 7 di negara bagian Maine, Amerika Serikat (Garthwait dan Weller, 2005). Teori yang dijadikan dasar adalah teori *diffusion of innovation* dari Rogers. Secara singkat peneliti mendeskripsikan substansi teori sebagai berikut: penerimaan terhadap suatu inovasi dipengaruhi oleh kontekstual sistem sosial tentang unit-unit yang saling berkaitan. Berdasarkan pada teori tersebut dilakukan revidu terhadap literatur yang berasal dari berbagai jurnal yang mendukung terhadap teori tersebut dengan merujuk pada difusi penggunaan komputer Laptop oleh siswa, dengan sikap dan kompetensi guru sebagai *intervening variabel*.

Deskripsi di atas menunjukkan, pada derajat yang berbeda, alasan mengapa kerangka teori dan konsep tetap diperlukan dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, yakni seorang penelitian tidak dapat melakukan pengumpulan data berdasarkan pada variabel yang ditetapkan secara acak. Setiap data harus mempunyai rujukan teori dan konsep yang jelas. Di lain pihak ada juga yang berpendapat bahwa dalam penelitian yang menggunakan

metode kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti. Hal ini tidak berarti bahwa ketika pengumpulan data tidak mempunyai dasar teori dan konsep yang mendasari dalam mengumpulkan data.

Terdapat dua hal yang menjadikan penelitian sosial perlu untuk dibaca dan atau dimanfaatkan hasilnya. Pertama adalah temuan dari penelitian itu sendiri. Kedua, tinjauan perspektif peneliti terhadap temuan itu. Tinjauan perspektif ini tidak bisa dilakukan jika peneliti hanya mendeskripsikan hasil penelitian dan tidak menginterpretasikannya. Untuk dapat melakukan interpretasi terhadap temuan tersebut, seorang peneliti sosial perlu mempunyai banyak informasi berkenaan dengan teori yang digunakan dalam mengembangkan kerangka penelitian dan rujukan empiris yang bersumber dari jurnal-jurnal. Artikel yang dimuat dalam jurnal-jurnal ilmiah menyajikan berbagai informasi empiris yang berasal dari berbagai konteks.

### 2.3 Karakteristik Kebijakan Pendidikan sebagai kebijakan publik

Secara sederhana definisi kebijakan publik, seperti yang dikemukakan oleh Dye (1984:1), kebijakan publik sebagai "*whatever government*

*choose to do or not to do*". Oleh karena dampak dari kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah mengenai pada masyarakat luas, maka kebijakan pendidikan juga disebut dengan kebijakan publik. Namun demikian, kebijakan publik tersebut diputuskan berdasarkan suatu maksud yang akan dicapai oleh pemerintah, oleh karena itu Anderson (1984:3) secara lebih komprehensif mendefinisikan kebijakan publik merupakan *"a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"*. Kedua pengertian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan produk dari pemerintah yang tidak dilakukan secara acak, melainkan karena ada tujuan tertentu yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan tersebut.

Kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah mempunyai tujuan tertentu yakni menjadikan manusia Indonesia menjadi yang cerdas dan berbagai karakteristik yang menunjukkan manusia berkualitas. Dan secara eksplisit hal ini dinyatakan dalam fungsi sistem pendidikan nasional seperti yang dinyatakan pada Pasal 3 Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

yang berbunyi:

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Pertanyaan berikut adalah, bagaimana kebijakan publik tersebut terbentuk? Atau dengan kata lain, tahap apa yang dilakukan oleh pemerintah atau lebih tepatnya instansi pemerintah untuk sampai pada suatu kebijakan. Terdapat beberapa pendekatan yang muncul untuk memahami proses kebijakan publik tersebut. Beberapa pendekatan dalam proses kebijakan berasal dari ilmu politik dan ilmu ekonomi. Pendekatan yang terakhir biasanya memusatkan pada proses pengambilan keputusan dengan menggunakan model matematika. Model matematika ini biasanya dibuat pada kondisi *ceteris paribus*. Sedangkan yang digunakan oleh yang pertama

biasanya lebih menyeluruh (*functionalist approach*).

Pendekatan proses kebijakan yang dikemukakan Lasswell, seperti yang dikutip oleh Brewer dan deLeon (1983), tahap pengambilan kebijakan meliputi (1) *initiation*, (2) *estimation*, (3) *selection*, (4) *implementation*, (5) *evaluation*, dan (5) *termination*.

(1) *Initiation*. Tahap ini merupakan tahap paling awal dimana permasalahan sudah mulai mendapatkan perhatian dari kalangan pengambil kebijakan. Informasi mengenai masalah tersebut masih bersifat kasar dan implikasi dari masalah tersebut belum dapat diantisipasi. Namun demikian, permasalahan tersebut sudah dianggap sebagai hal yang perlu mendapatkan prioritas.

Pada tahap ini diperlukan pemikiran yang kreatif tentang bagaimana menemukan inti permasalahan, ketepatan dalam menentukan obyektif, serta pilihan-pilihan dalam pemecahan masalah yang inovatif, dan rencana dan konsep sementara tentang bagaimana melakukan pendekatan terhadap permasalahan.

(2) *Estimation*. Pada tahap ini, perkiraan konsekuensi dari kemungkinan untuk mengadap

permasalahan tersebut dalam kebijakan telah dilakukan. Dampak dan eksekusi juga sudah mulai dipertimbangkan. Pada tahap ini pertimbangan empiris, ilmiah, dan proyektif digunakan sebagai dasar bagi kemungkinan pengangkatan permasalahan tersebut sebagai kebijakan.

(3) *Selection* adalah berkaitan dengan kenyataan bahwa pada akhirnya penentu kebijakan harus mengambil keputusan. Pengambilan keputusan ini tentu saja banyak dipengaruhi oleh pengalaman pengambil keputusan, hasil analisis. Dalam tahap ini pengambil keputusan banyak dilibatkan dengan berbagai perhitungan tentang kemungkinan menentukan strategi pelaksanaan kebijakan. Termasuk dalam proses ini adalah penterjemahan kebijakan dalam bentuk program-program.

(4) *Implementation*. Pada tahap ini kebijakan dilaksanakan. Pada kenyataannya, implementasi kebijakan adalah berupa pelaksanaan program. Berbagai reaksi baik yang bersifat negatif maupun positif muncul pada saat implementasi. Dalam banyak kasus, reaksi yang muncul tersebut tidak terantisipasi pada

tahap estimation dan selection. Oleh karena itu, implimentasi kebijakan biasanya diikuti dengan evaluasi.

- (5) *Evaluation*. Tidak seperti tahap-tahap sebelumnya, tahap evaluasi tidak didasarkan pada pertimbangan yang bersifat analitik atau pemikiran, tetapi berdasarkan pada data empiris. Oleh karena itu evaluasi lebih bersifat retrospektif dari pada introspektif, artinya evaluasi memberikan penilaian yang dapat merupakan umpan balik bagi initiation, estimation dan selection.

Pertanyaan yang diajukan dalam pelaksanaan evaluasi ini biasanya meliputi: pihak manakah yang mendapatkan keuntungan dan atau kerugian dengan dilaksanakannya suatu kebijakan, kriteria apa yang dapat digunakan untuk mengatakan bahwa suatu kebijakan dikatakan sukses atau tidak sukses.

- (6) *Termination*. Pada tahap ini dilakukan berbagai perbaikan terhadap bagian-bagian dari kebijakan yang dianggap tidak layak, tidak menunjang terhadap pelaksanaan kebijakan.

Mayer dan Greenwood (1984) mengidentifikasi 9 proses yang meliputi (1) penetapan tujuan, (2)

penilaian kebutuhan, (3) spesifikasi obyektif, (4) perancangan perangkat tindakan alternatif, (5) perkiraan konsekuensi dari tindakan-tindakan alternatif, (6) pemilihan perangkat tindakan, (7) implementasi, (8) evaluasi hasil implementasi kebijakan, dan (9) umpan balik.

Kedua pendekatan tersebut di atas kurang lebih serupa. Perbedaannya adalah bahwa pendekatan oleh Mayer dan Greenwood (1984) lebih terperinci. Sebetulnya langkah-langkah yang dikemukakan oleh Mayer dan Greenwood telah tercakup dalam langkah-langkah yang ditentukan oleh Lasswel. Langkah penetapan tujuan dan penilaian kebutuhan sudah masuk dalam tahap initiation. Spesifikasi obyektif dan perancangan perangkat tindakan sudah termasuk dalam tahap seleksi, implementasi dan evaluasi adalah sama dengan implementasi dan evaluasinya Lasswel. Berdasarkan pada kedua pendekatan tersebut, pendekatan yang digunakan pada tulisan ini akan terdiri dari dari: (1) *agenda setting*, (2) pengambilan keputusan, (3) implementasi, dan (4) evaluasi. Pada dasarnya pendekatan yang dibahas di sini tidak berbeda dengan dua pendekatan yang dikemukakan oleh Lasswel, dan Mayer dan Greenwood.

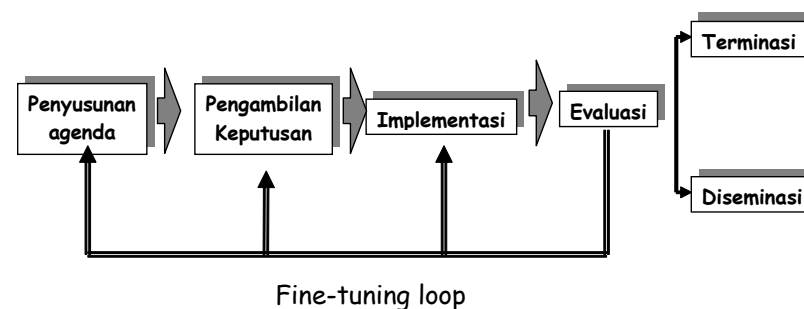
Yang membedakan adalah pada penekankannya. Pendekatan yang dikembangkan di sini adalah lebih menekankan pada proses organisasi dan pascaevaluasi (lihat gambar 1).

Titik pangkal dari pendekatan ini adalah penyusunan agenda. Pada saat proses kebijakan telah memasuki tahap ini diasumsikan bahwa suatu permasalahan telah merupakan isu kebijakan baik oleh anggota masyarakat ataupun kalangan pemerintah. Pada saat isu tersebut memasuki lingkungan birokrasi, maka permasalahannya adalah bagaimana menyusun kemungkinan-kemungkinan untuk mengadopsi isu tersebut dalam skala prioritas kebijakan. Hal ini searah dengan pendapat Kingdon (1984:3) yang menyatakan bahwa “*The agenda, as I conceive of it, is the list of subjects or problems to which governmental officials, and people outside of government closely associated with those*

*officials, are paying some serious attention at any given time*”.

Pada tahap ini pengambil kebijakan pendidikan tidak hanya memberikan perhatian serius saja, tetapi juga melakukan perkiraan tentang akibat dari kemungkinan diterapkannya kebijakan ini. Perkiraan yang dilakukan termasuk memperkirakan konsekuensi, dan dampak positif dan negatif.

Setelah suatu isu diangkat sebagai agenda kebijakan publik, tahap berikutnya adalah membuat keputusan berkenaan dengan isu tersebut. Tahap pengambilan keputusan ini merupakan tahap kritikal karena sekali suatu permasalahan diputuskan untuk dijadikan kebijakan sulit untuk dicabut. Hal ini karena berkaitan dengan kekuasaan atau reputasi lembaga dan pengambil keputusan.



Gambar 1. Tahapan proses kebijakan publik

Meskipun demikian setiap keputusan tentu mengandung resiko untuk tidak dapat dilaksanakan oleh karena adanya keterbatasan informasi yang diterima oleh pengambil keputusan. Simon (1976) menyebut keadaan ini sebagai *bounded rationality*. Dalam keadaan seperti ini pengambil keputusan tidak dapat mengambil keputusan pada tingkat maksimum. Tingkat kepuasan yang mereka capai adalah tingkat mencukupi (*satisficing*) bukan pada memuaskan (*satisfying*). Konsep *satisficing* ini merupakan kritik kalangan Weberian yang rasionalistis yang berasumsi bahwa semua akibat dari keputusan dapat diantisipasi, tujuan yang akan dicapai dari suatu keputusan dapat dikuantifikasi.

Kritik lain terhadap pengambilan keputusan yang bersifat rasionalistis juga diajukan oleh Lindblom (1959). Oleh karena adanya ketidakmampuan pengambil keputusan secara rasional, maka pengambil keputusan tidak berlangsung secara linier, tetapi berlangsung melalui proses yang berliku-liku, sehingga dimungkinkan bahwa pengambil keputusan untuk kembali ke langkah permulaan dari proses pengambilan keputusan. Proses ini oleh Lindblom disebut sebagai proses *muddling through*.

Tahap pengambilan keputusan biasanya disebut sebagai *black-box*. Hal ini disebut demikian oleh karena proses pengambilan keputusan tersebut hanya diketahui oleh pengambil kebijakan (Dye, 1984). Apa yang diketahui oleh pihak luar adalah hasil keputusannya. Analogi ini diambil dari istilah *black-box* pesawat terbang. Isi dari *black-box* tersebut dapat dianalisis dan difahami setelah terjadi kecelakaan pesawat; tetapi tidak dapat diketahui sebelum terjadi kecelakaan. Petugas radar di bandara udara tidak dapat mendeteksi apa yang terjadi sebelum kecelakaan.

Pada saat keputusan tersebut keluar dari pengambil keputusan, maka keputusan tersebut telah menjadi kebijakan publik. Sebelum implementasi kebijakan dilakukan justifikasi yang dimaksud sebagai penyusunan strategi bagi implementasi kebijakan. Justifikasi dilakukan oleh manajemen kelas menengah (*middle management*). Dalam mengatur strategi implementasi kebijakan isi kebijakan sudah dianggap sebagai sesuatu yang *given*.

Ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan publik dapat diketahui setelah diadakan evaluasi. Pada pelaksanaan evaluasi yang dikumpulkan adalah data empirik. Ketepatan dan kesalahan dalam implementasi

kebijakan tergantung dari hasil evaluasi.

Terdapat tiga kemungkinan dari hasil evaluasi. Pertama adalah mengadakan evaluasi ulang terhadap tahap-tahap sebelumnya (agenda setting, pengambilan keputusan, justifikasi, dan implementasi). Rossi dan Freeman (1985) menyebutnya sebagai *fine-tuning* proses kebijakan. Kemungkinan kedua adalah mempertahankan *status quo* kebijakan (Williams, 1971). Mempertahankan kebijakan dapat pula berarti bahwa kebijakan telah dianggap layak untuk disebarkan pada ruang lingkup yang lebih luas (diseminasi). Kemungkinan ketiga adalah terminasi. Dengan kata lain hasil evaluasi menyatakan bahwa kebijakan harus diberhentikan karena dianggap tidak mempunyai nilai kelayakan untuk diterapkan dalam skala yang lebih luas.

#### 2. 4 Maksimalisasi sinergi penelitian sosial vis a vis kebijakan pendidikan

Untuk maksimalisasi penelitian sosial vis a vis kebijakan pendidikan, terdapat tiga konsesi yang perlu mendapat perhatian oleh peneliti sosial. Pertama, peneliti sosial menempatkan diri untuk melayani pengambil kebijakan pendidikan dari pada sebaliknya. Konsekuensi ini

menuntut bahwa peneliti sosial dalam merumuskan rekomendasi berorientasi pada solusi jangka pendek atau paling tidak jangka menengah. Jika hasil penelitian sosial diarahkan untuk pengambilan kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan, maka rekomendasi yang diajukan oleh peneliti sosial lebih ramah bagi pengambil kebijakan dengan tidak menggunakan terminologi dan konsep yang rumit, serta sedapat mungkin secara lebih eksplisit mengarah pada solusi kebijakan (Small, 2005).

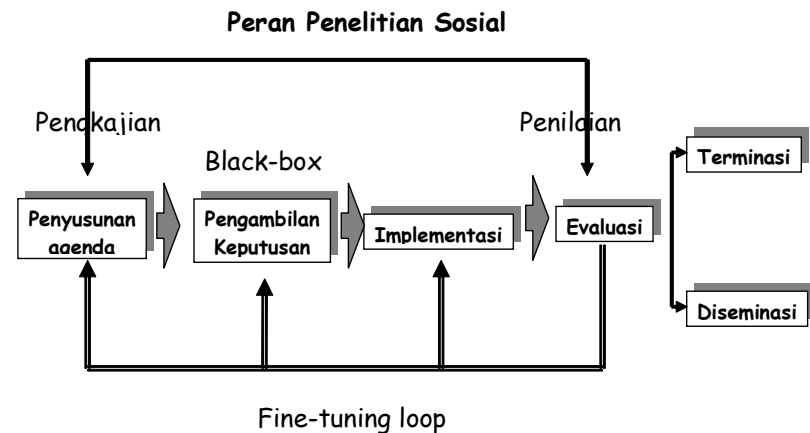
Kedua, pengertian pemanfaatan hasil penelitian mempunyai tiga konotasi yakni (1) rekomendasi dari hasil penelitian secara langsung dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Dalam konotasi seperti ini rumusan kebijakan dapat secara langsung menggunakan rumusan yang ada dalam rekomendasi hasil penelitian. (2) rekomendasi hasil penelitian dijadikan sebagai rujukan oleh pengambil kebijakan. Dalam hal ini rumusan kalimat dalam rekomendasi bisa saja berbeda dengan rumusan kebijakan, tetapi makna atau pesan yang disampaikan oleh rekomendasi penelitian sosial tersampaikan, walaupun secara implisit, dalam rekomendasi. (3) rekomendasi hasil penelitian menjadi pertimbangan

dalam pengambilan kebijakan. Dalam konteks ini, rekomendasi hasil penelitian sosial dapat menjadi peringatan yang menyatakan bahwa pemerintah tidak melakukan seperti apa yang direkomendasikan oleh suatu penelitian sosial. Ketiga, ketiga peneliti sosial melakukan penelitian untuk kepentingan pengambilan kebijakan penelitian ruang gerak peneliti sosial berada pada zona feriveral proses pengambilan kebijakan.

Gambar 2 menunjukkan peranan penelitian dalam proses perumusan kebijakan ada dua yaitu untuk memberikan masukan dalam agenda setting dan memberikan masukan bagi umpan balik, diseminasi atau bahkan terminasi kebijakan pendidikan.

Untuk peranan yang pertama, penelitiannya disebut dengan pengkajian, sedangkan untuk yang kedua disebut dengan penilaian. Untuk dapat memberikan masukan bagi perumusan kebijakan, baik pengkajian maupun penilaian tetap harus memperhatikan norma-norma penelitian.

Dalam kerangka ini, baik penelitian sosial murni atau penelitian sosial terapan, mempunyai dua peran. Pertama adalah peran evaluatif (Rossi dan Freeman, 1985). Dalam fungsi ini penelitian senantiasa diarahkan untuk menilai keterkaitan antara dua faktor atau lebih. Fungsi informatif, yakni penelitian senantiasa diarahkan untuk memberikan informasi yang didasarkan pada proses



Gambar 2. Peran penelitian sosial pada proses kebijakan publik

pengumpulan fakta dan pengelompokan fakta secara sistematis; dan yang ketiga adalah fungsi implikatif, yang artinya bahwa setiap hasil penelitian yang didasarkan pada proses pengumpulan dan pengelompokan fakta secara sistematis diharapkan memberikan sumbangan baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau dalam praktek-praktek sosial baik yang dilakukan oleh suatu lembaga atau peneliti secara individual. Hal ini berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh Sayer (1984) bahwa suatu penelitian hendaklah berperan sebagai pengembang ilmu pengetahuan yang mana ilmu pengetahuan tersebut senantiasa bersifat dinamis.

Peran kedua adalah pengkajian pada dasarnya hampir sama dengan peran evaluatif. Perbedaannya terletak pada momentum kapan suatu penelitian sosial mulai dilaksanakan. Pada pengkajian penelitian sosial dilaksanakan ketika kebijakan belum diimplementasikan. Dengan demikian, hasilnya diarahkan untuk proses penyusunan kebijakan. Di lain pihak peran hasil penelitian sosial pada peran evaluatif hasilnya tiga kemungkinan yaitu *finetuning*, diseminasi, atau bahkan terminasi kebijakan.

Untuk menilai sampai seberapa jauh hasil penelitian dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan paling tidak ada dua pendekatan yang bisa ditampilkan. Dalam diskusi ini selanjutnya kedua pendekatan tersebut akan disebut dengan pendekatan metodologis dan pendekatan *content*.

#### 2.4.1 Pendekatan Metodologis

Pendekatan metodologis menekankan pada keterkaitan antara bagian-bagian dari penelitian. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (1989), misalnya, mensyaratkan bahwa suatu penelitian harus mempunyai empat bagian yaitu: (1) pendahuluan yang terdiri dari perumusan masalah dan tujuan penelitian; (2) tinjauan pustaka yang meliputi relevansi, penyusunan daftar pustaka, dan kemitakhiran/sumber asli; (3) metode penelitian yang meliputi kesesuaian dengan masalah, ketepatan rancangan penelitian, ketersediaan sarana, dan ketepatan peralatan; dan (4) hasil penelitian yang meliputi manfaat hasil dan kesesuaian hasil dengan tujuan penelitian. Seperti halnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (1989), Borg dan Gall (1989) juga menekankan keterkaitan antara tujuan penelitian, hipotesa yang dikembangkan untuk menjawab tujuan penelitian, review

bahan-bahan perpustakaan untuk mendukung pernyataan hipotesa yang dikembangkan dalam penelitian, dan pemilihan alat pengukur (pengumpul data), metode statistik yang tepat, dan pemilihan sampel yang representatif. Suatu penelitian sosial akan memberikan sumbangan terhadap kebijakan jika terdapat hubungan yang logis antara unsur-unsur penelitian tersebut.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, pada diskusi berikut ini pendekatan metodologis ini akan dijabarkan lebih lanjut dengan menekankan pada signifikansi penelitian, *coherence*, dan representasi hasil penelitian.

1) Signifikansi Penelitian. Sering terjadi bahwa suatu penelitian telah menggunakan metode penelitian yang cukup handal dan analisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian, akan tetapi hasil penelitian tersebut tidak memberikan manfaat yang cukup penting baik bagi pengembangan ilmu dan/atau dampak praktis bagi kebijakan pendidikan. Hal ini karena penelitian tersebut terjebak dalam *trivialism*, artinya permasalahan yang diteliti bukan merupakan permasalahan yang penting atau strategis. Banyak pihak, misalnya lembaga peme-

rintah menganggap hal yang diteliti tidak memberikan dampak yang penting bagi perbaikan implementasi kebijakan pendidikan. Bisa juga *trivialism* ini terjadi oleh karena suatu penelitian sosial memusatkan pada permasalahan-permasalahan di mana orang awam juga telah dapat menduga hasilnya. Artinya tanpa penelitianpun orang awam sudah bisa memperkirakan hasil penelitian. Misalnya penelitian tentang pengaruh tingkat kecerdasan anak terhadap prestasi belajar anak, sudah dapat diramalkan bahwa anak yang mempunyai tingkat kecerdasan tinggi, *ceteris paribus*, akan mempunyai prestasi belajar yang tinggi.

Salah satu cara untuk memberikan pertimbangan terhadap tingkat signifikansi suatu permasalahan yang sedang diteliti adalah dengan proses content validity permasalahan penelitian. Proses ini bisa dilakukan dengan melalui konsultasi dengan para ahli atau para praktisi yang telah berpengalaman di bidangnya.

2) *Coherence*. Pengertian coherence menunjuk pada keterkaitan antar bagian dalam suatu penelitian. Alur informasi yang disajikan

dalam penelitian merupakan satu kesatuan yang berurutan dari awal bagian dari penelitian sampai dengan akhir penelitian yang pada umumnya merupakan kesimpulan dan saran dari penelitian. Pada bagian awal dari suatu penelitian yang bersifat *coherent*, pembaca sudah harus dapat memperoleh informasi tentang tujuan penelitian dan kemungkinan informasi tentang hasil penelitian, sehingga dengan demikian juga dapat diantisipasi kemungkinan rekomendasi yang akan dihasilkan dari hasil penelitian.

Oleh karena permasalahan kebijakan bersifat kompleks maka maka rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh suatu penelitian sosial bersifat *eclectic*. Artinya rekomendasi tersebut dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang dan metodologi penelitian tidak bersifat monometodologi tetapi paling tidak dualmetodologi atau bahkan multimetodologi (Colley dan Bickel, 1986). Dengan adanya rekomendasi yang bersifat *eclectic*, pengambil kebijakan lebih mempunyai "ruang" dalam melakukan manuver untuk menentukan bagian rekomendasi

yang mana yang akan dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan atau bahkan memutuskan apakah rekomendasi tersebut akan dipakai atau tidak.

3) Representasi Hasil Penelitian. Representasi hasil penelitian berkaitan dengan sampel yang diambil oleh suatu penelitian. Biasanya representasi penelitian ini berdasarkan pada prinsip bahwa semakin banyak subyek yang diambil dalam suatu penelitian, maka semakin representatif suatu penelitian. Namun demikian besarnya sampel (*sample size*) bukan merupakan satu-satunya faktor yang menjamin representasi dari hasil penelitian, tanpa mempertimbangkan denominator heterogenitas dari populasi. Semakin besarnya sample size memang akan menjamin representasi hasil penelitian asal struktur populasi dapat diidentifikasi. Hal ini mengandung pengertian bahwa sample size bisa kecil dengan catatan bahwa informasi tentang struktur populasi dapat diketahui. Pentingnya untuk mengetahui terhadap representasi hasil penelitian berkaitan dengan *population target* dari kebijakan kalau saja kebijakan tersebut

dirumuskan berdasarkan pada hasil penelitian. Kebijakan yang didasarkan pada informasi penelitian yang kurang representatif, cenderung bias, yakni memberikan perhatian pada sekelompok masyarakat tertentu dan lebih mengabaikan golongan masyarakat yang lain.

#### 2.4.2 Pendekatan *Content*

Pendekatan kedua untuk menilai penelitian dalam kaitannya dengan perumusan kebijakan dikemukakan oleh Alkin (1985) dan Williams (1971). Pendekatan ini lebih mengarah pada relevansi antara penelitian dan kebijakan, akan tetapi tidak seperti pendekatan yang pertama pendekatan yang oleh Alkin dan Williams ini kurang secara eksplisit mempertimbangkan aspek metodologis. Pokok pendekatan dari Alkin dan Williams ini meliputi keterkaitan (*pertinence*), ketepatan waktu (*time liness*), dan (kualitas).

1) Keterkaitan. Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa penelitian baik itu penelitian murni atau penelitian terapan selalu mempunyai implikasi yang berguna bagi usul perumusan kebijakan. Untuk mengukur sampai seberapa jauh kegunaan hasil penelitian tersebut ter-

gantung dari dua faktor yaitu (1) kecermatan peneliti dalam mengangkat isu yang akan diteliti, dan (2) ketepatan dalam pengembangan *construct* yang akan diukur dalam penelitian tersebut.

2) Ketepatan waktu. Pemanfaatan hasil penelitian juga tergantung pada faktor waktu. Ini berarti bahwa peneliti dituntut untuk dapat memperhitungkan kapan hasil penelitian tersebut harus diajukan kepada pengambil kebijakan pendidikan sebagai usulan kebijakan. Keterlambatan atau ketidaktepatan waktu dalam pengajuan usul kebijakan akan menyebabkan seolah-olah hasil penelitian tidak mempunyai nilai sebagai usul kebijakan meskipun usul tersebut bersifat komprehensif dan obyektif. Berkenaan dengan ketepatan waktu dalam pemanfaatan hasil penelitian bagi usulan kebijakan tidak tergantung dari waktu yang biasanya dihitung berdasarkan hari, atau bulan, akan tetapi berdasarkan pada sampai seberapa lama suatu isu tetap merupakan isu, artinya tetap dianggap penting baik oleh lembaga pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini adalah tugas peneliti untuk menyeleksi isu-isu yang senan-

tiasa mendapatkan perhatian dari lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat, dengan cara mengadakan pengamatan terhadap pola-pola (trend) dari perkembangan suatu isu kebijakan.

3) Mutu hasil penelitian sosial merujuk pada mutu rekomendasi yang diusulkan yakni ketepatan dalam mengangkat isu kebijakan dan menjadi solusi yang tepat. Alkin (1985) menyebutkan bahwa biasanya ada faktor *trade-off* antara mutu dan ketepatan waktu. Hal ini berarti bahwa bila laporan hasil penelitian dapat diselesaikan dalam waktu singkat ada kemungkinan bahwa kualitas laporan cenderung kurang komprehensif. Akan tetapi, sebagian permasalahan seperti ini bisa diatasi dengan mengembangkan sistem indikator yang jelas.

### 3. Simpulan dan Saran

Dinamika pada kebijakan pendidikan memerlukan informasi yang *up-to-date* sesuai dengan perkembangan jaman. Informasi yang diperlukan dapat berasal dari berbagai sumber, salah satu sumber yang utama adalah penelitian sosial. Meskipun penelitian sosial mempunyai karakteristik yang berbeda dengan dengan kebijakan pendidikan namun bukan berarti

keduanya tidak dapat mengisi satu dengan lainnya. Setiap hasil penelitian sosial selalu dua hilir (*outlet*) yaitu pengembangan teori (*theory refinement*) dan kebijakan publik, termasuk kebijakan pendidikan, baik untuk penyusunan agenda kebijakan maupun umpan balik terhadap implementasi kebijakan.

Kurangnya pemanfaatan hasil penelitian sosial bagi kebijakan pendidikan bukan disebabkan *incompatibility* substansi hasil penelitian sosial terhadap proses maupun substansi kebijakan pendidikan. Permasalahannya terletak komunikasi antara peneliti sosial dengan pengambil kebijakan pendidikan yang disebabkan oleh beberapa kondisi. Pertama, perbedaan *circumstances* antara peneliti sosial dan pengambil kebijakan pendidikan. Kedua, orientasi yang berbeda antara peneliti sosial dan pengambil kebijakan. Ketiga, adanya mitos bahwa penelitian sosial murni tidak *compatible* dengan penelitian sosial terapan.

Pemanfaatan hasil penelitian sosial dapat dilakukan jika ada konsesi tentang siapa melayani siapa. Dalam tulisan ini diajukan argumentasi bahwa konsesi tersebut adalah peneliti sosial mengambil peran melayani pengambil kebijakan.

Dengan argumentasi ini maka hasil penelitian yang dirumuskan dalam bentuk rekomendasi lebih berorientasi pada kebutuhan dan tingkat pemahaman pengambil kebijakan. Secara kongkrit hal ini berarti bahwa rekomendasi yang dikembangkan dari hasil penelitian sosial lebih mengarah pada solusi kebijakan dan tidak menggunakan terminologi yang bersifat eksklusif dalam arti hanya dipahami oleh antar peneliti sosial.

### Pustaka Acuan

- Alkin, M.C. 1985. *A Guide for Evaluation Decision Makers*. Beverly Hills: Sage.
- Anderson, J.A. 1984. *Public policy-making*. Edisi ketiga. Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Borg, W.R. dan Gall, M.D. 1989. *Educational Research*. Edisi kelima. New York, New York: Longman.
- Brewer, G.D. & deLeon, P. 1983. *The foundations of policy analysis*. Pacific Groove, C.A.: Brooks/Cole Publishing Company.
- Carmine, E.G dan Zeller, R.A. 1979. Reliability and validity assessment. Beverly Hills: Sage Publications.
- Coleman, J.S. 1988. "Social capital" and schools. The Education Digest. 53(8), 6-9.
- Cooley, W. & Bickel, W. 1986. *Decision oriented educational research*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1989. *Petunjuk pelaksanaan pengelolaan penelitian di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Ditjen Dikti.
- Dye, T.R. 1984. *Understanding public policy*. Edisi keempat. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Inc.
- Garthwait, A dan Weller, H.G. 2005. *A year on the life: two seventh grade teachers implement one-to-one computing*. Journal of Research on Technology in Education. 37 (4), 361-377.
- Goldstein, A.E. et.al. 1996. *An ethnographic approach to understanding service uses among ethnically diverse low income families*. Married and

- Family Review. 24(3-4), 297-321.
- Kingdon, J.W. 1984. *Agendas, alternatives, and public policies*. Boston: Little, Brown and Company.
- Kompas, 17 Oktober 2007. *Nobel ekonomi untuk perbaikan pasar*. hal. 12.
- Lindblom, C.E. 1959. *The science of "muddling through"*, dalam Jay M. Shafritz dan Albert C. Hyde. *Classic of public administration*. Chicago: The Dorsey Press. 263 - 75.
- Mayer, R.R. & Greenwood, E. 1984.(terj). *Rancangan penelitian kebijakan sosial*. Jakarta: Pustekkom Dikbud dan C.V. Rajawali.
- Nguyen, D.M., Hsieh, J.C.J, dan Allen, G.D. 2006. The impact of web-based assessment and practice on students' Mathematics learning attitude. The Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching. 25(3), 251 -279.
- Poon, J.P.H. 2004. Quantitative methods: past and present. Progress in Human Geography. 28 (6), 807-814.
- Rossi, P.H. and Freeman, H.E. 1985. *Evaluation: A Systematic Approach*. Newbury Park: Sage.
- Sayer, A. 1984. *Method in Social Science: A Realist Approach*. London: Huthchinson.
- Simon, H.A. 1976. *Administrative behavior*. New York: The Free Press.
- Small, S.A. 2005. Bridging research and practice in the family and human sciences. *Family Relations*, 54 (3), 320 – 335.
- Toutkoushan, R.K. dan Curtis, T. 2005. Effects of socioeconomic factors on public high school outcomes and ranking. *The Journal of Educational Research*. 98 (5), 259 – 270.
- Wikman, A. 2006. *Reliability, validity and true values in surveys*. *Social Indicators Research*, 78, 85-110.
- Williams, W. 1971. *Social Policy Research and Analysis*. New York: American Elsevier Publishing Company, Inc.